



21/Renja/DPMPTSP/2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

invest in

aceh

Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata
Banda Aceh, Indonesia
P : +6265123170, F : 6265123171
E : investasi@acehprov.go.id
W : dpmptsp.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan “**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Aceh melalui bidang penanaman modal.

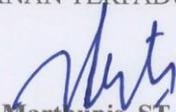
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi tercapainya cita-cita pembangunan di bidang penanaman modal dalam rentang satu tahun kedepan.

Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan Ke-4 RPJP Aceh Tahun 2005-2025 dan penjabaran tahun pertama RPA Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJP Aceh Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005 – 2025 adalah: “ACEH YANG ISLAMIC, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Marthunis, ST, D.E.A

Pembina Utama Muda

NIP. 19770805 200312 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja	2
1.1.2 Proses Penyusunan Renja	3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	19
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program Lintas Pemerintahan	22
2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	23
2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA	28
2.4.1 Uraian tentang Perbandingan antara Rancangan	

Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan	28
2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan Tersebut Dilaksanakan	28
2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan penting jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	29
2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kab/Kota).....	29
2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan tersebut dengan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.1.1 Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	30
3.2 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	32
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V. PENUTUP	38
5.1 Kaidah Pelaksanaan	38
5.2 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....	38
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	39

LAMPIRAN

- Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra Tahun 2020
- Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA DPMPTSP
- Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2022 Provinsi Aceh
- Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2022 Provinsi Aceh
- Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 DPMPTSP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Program / Kegiatan DPMPTSP Tahun 2021	09
Tabel 2.2	Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2017-2021	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Kerja SKPA Kabupaten/Kota	3
Gambar 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	4
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	5
Gambar 3.1	Program Unggulan Dalam RPJMA 2017-2022	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di sebuah wilayah. Penanaman modal dibagi atas dua kategori, yaitu : Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal atau juga disebut dengan investasi merupakan salah satu pembentuk dari sebuah perekonomian wilayah atau produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai ekonomi total dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Investasi dapat meningkatkan kemampuan sebuah daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan investasi dengan membangun pabrik atau membeli mesin serta alat produksi lainnya. Pabrik atau mesin baru tersebut akan menyebabkan perusahaan tersebut mampu memproduksi produk yang lebih banyak. Kenaikan produksi berarti total output barang dari sebuah negara bertambah dan pada akhirnya menambah nilai PDRB.

Selain meningkatkan total output barang dan jasa, investasi juga akan memberikan kesempatan kerja lebih besar. Pabrik dan mesin baru memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan atau merawatnya. Keberadaan pabrik dan mesin baru menambah produktifitas tenaga kerja karena memungkinkan menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak dengan penggunaan sumber daya (bahan dan waktu) yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa investasi atau penanaman modal dapat menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan manfaat investasi sebagaimana disebutkan diatas, Pemerintah Aceh menempatkan realisasi investasi sebagai salah satu sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Aceh, yaitu: kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun investasi tidak datang ke sebuah wilayah dengan sendirinya. Banyak faktor atau determinan yang menyebabkan para penanam modal atau investor untuk memilih Aceh sebagai daerah tujuan/destinasi investasinya. Diantara dari faktor tersebut adalah ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan pasar, kondisi politik dan keamanan yang stabil, serta ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil.

Faktor atau determinan tersebut diatas menyiratkan bahwa usaha untuk menarik investasi merupakan usaha yang melibatkan lintas sektor, mulai dari sektor hulu atau produksi hingga sektor hilir (pasar), bahkan sektor pemungkin (*enabling*) dan penunjang seperti politik/keamanan dan infrastruktur dan ketenagakerjaan. Karena itu diperlukan rencana kerja penanaman modal dan pelayanan perizinan yang mampu menjadi rujukan bersama dalam melaksanakan kebijakan sektoral dalam rangka menarik penanaman modal atau investasi dan mendorong pertumbuhan usaha di Aceh.

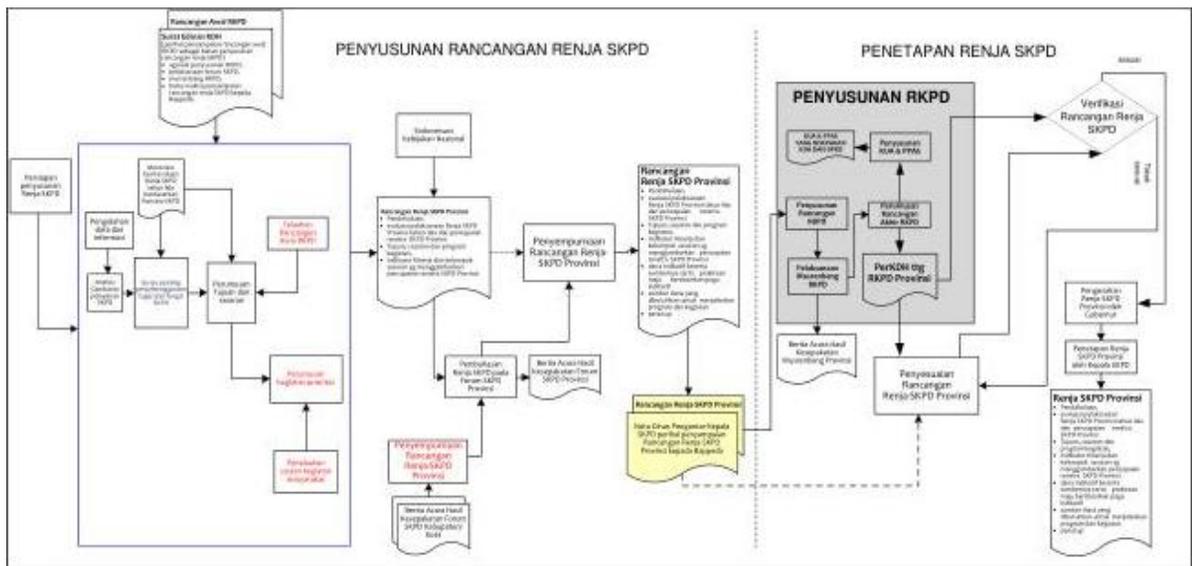
1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPA sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPA kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPA menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA, evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPA dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPA menetapkan Renja SKPA untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPA merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPA yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang RKPA.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPA merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPA yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPA setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPA Kabupaten/Kota

Adapun tahapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Penyusunan Renja

Kegiatan persiapan penyusunan Renja dilakukan melalui: 1). Pembentukan Tim Penyusun Renja; 2). Orientasi mengenai Renja; 3). Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja; dan 4). Pengumpulan Data dan Informasi

b. Tahap Pengolahan Data dan Informasi

Kegiatan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menganalisis data perizinan dan penanaman modal menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan penanaman modal.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

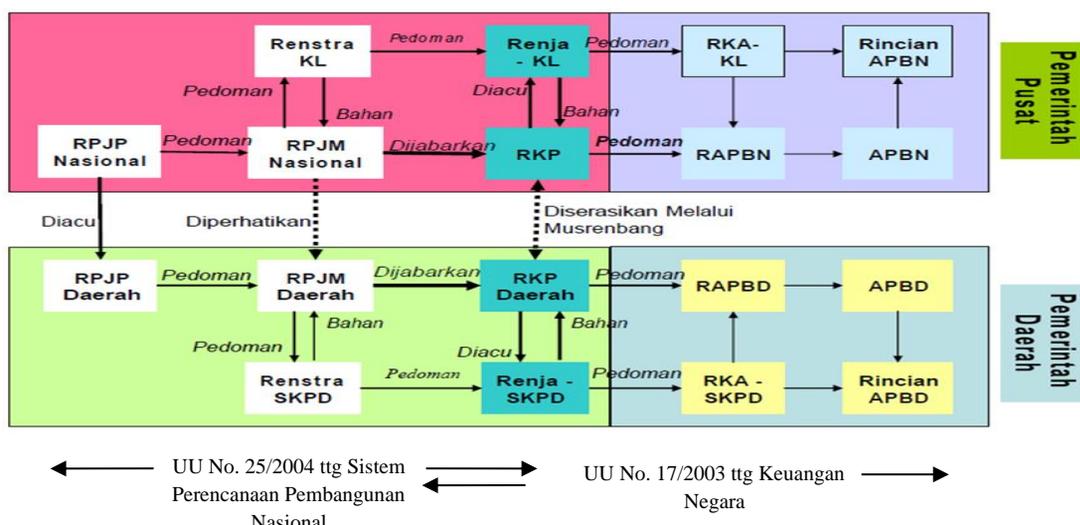
Kegiatan perumusan rancangan Renja dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 1). Analisis gambaran pelayanan SKPA; 2). Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu berdasarkan Renstra SKPA; 3). Menentukan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA; 4). Menelaah terhadap rancangan awal RKPA; 5). Merumuskan tujuan dan sasaran; 6). Menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 7). Perumusan kegiatan prioritas; 8). Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPA; 9). Penyempurnaan rancangan kerja SKPA; 10). Pembahasan forum SKPA; dan 11). Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPA sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

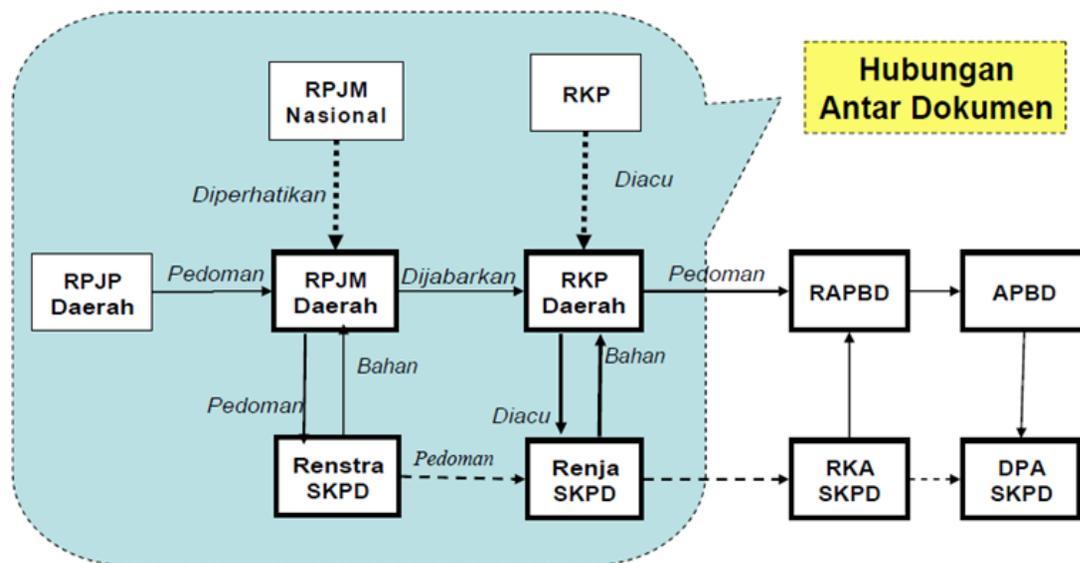
Adapun Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPA sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPA yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena itu, seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023;
21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Qanun Aceh No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
25. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
26. Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Gubernur Aceh No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh No. 97 tahun 2014 tentang Kawasan Perhatian Investasi Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
30. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
31. Peraturan Gubernur Aceh No. 95 tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh.
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberi arah pengembangan investasi pada

tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
2. Acuan bagi seluruh stakeholder penanaman modal dalam memadukan kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Aceh.
3. Pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.
4. Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran terpadu yang berbasis Hasil/Kinerja dan Responsif Gender.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2023 ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun lalu, menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh Tahun 2021 dan Renstra perangkat Aceh Tahun 2023-2026 (tabel terlampir), Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (tabel terlampir), Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh; Review terhadap Rancangan Awal RKPA.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta Program dan Kegiatan.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (tabel terlampir).
- Bab V : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU ACEH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 (tabel terlampir) 51.609.324.768

Pada tahun 2021, DPMPSTSP Aceh menargetkan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.067.704.188,- (91,20%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 45.273.117.182,- (87,72%). Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 berdasarkan realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan DPMPSTSP Tahun 2021

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BIDANG	JUMLAH BELANJA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
					Rp.	%
1	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		13=7+9+11 51.609.324.408	14 = (8+10+12) 45.273.117.182	15 87,72
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT	43.449.329.078	38.741.794.213	89,17
	2.18.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	273.552.000	126.526.950	46,25
1	2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	1.700.000	1.699.950	100,00
2	2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat	263.077.000	117.127.000	44,52
3	2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	8.775.000	7.700.000	87,75
	2.18.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Sekretariat	19.488.302.153	17.523.391.253	89,92
1	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	17.394.102.053	15.368.353.703	88,35
	2.18.01.1.02.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Sekretariat	7.104.391.053	7.112.257.240	100,11
	5.1.01.02	Tambahan Penghasilan PNS	Sekretariat	10.288.796.000	8.256.096.463	80,24
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Sekretariat	915.000	0	0,00
2	2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat	1.947.325.000	2.078.704.200	106,75
3	2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat	120.782.500	100.352.050	83,08
4	2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	26.092.600	12.821.300	49,14
	2.18.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Sekretariat	328.949.600	269.225.697	81,84
1	2.18.01.1.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Sekretariat	119.905.600	112.141.700	93,52
2	2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat	209.044.000	157.083.997	75,14

	2.18.01.1.06	KEGIATAN UMUM PERANGKAT DAERAH	Sekretariat	1.466.180.592	1.157.028.664	78,91
1	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	32.348.708	32.215.000	99,59
2	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	217.793.600	200.585.000	92,10
3	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	438.429.555	302.905.850	69,09
4	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	301.574.729	170.549.200	56,55
5	2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Sekretariat	37.920.000	29.816.000	78,63
6	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S	Sekretariat	438.114.000	420.957.614	96,08
	2.18.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretariat	19.999.998.830	17.145.636.593	85,73
	2.18.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	19.999.998.830	17.145.636.593	85,73
	2.18.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat	871.028.002	557.905.328	64,05
1	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	80.705.000	70.606.500	87,49
2	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Sekretariat	679.847.926	384.545.328	56,56
3	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	110.475.076	102.753.500	93,01
	2.18.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretariat	1.021.317.901	867.293.750	84,92
1	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Sekretariat	848.678.498	785.819.800	92,59
2	2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ge	Sekretariat	172.639.403	81.473.950	47,19
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	P2IPM	965.818.443	658.759.330	68,21
	2.18.02.1.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	P2IPM	238.183.000	151.880.608	63,77
	1.08.02.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasil	P2IPM	238.183.000	151.880.608	63,77
		Identifikasi Hambatan Regulasi	P2IPM	22.029.000	16.613.290	75,42
		Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi Aceh 2021	P2IPM	38.084.000	28.150.415	73,92
		Penyusunan Ranpergub Insentif	P2IPM	2.800.000	2.140.000	76,43
		Penyusunan Ranpergub Lahan Investasi	P2IPM	71.714.000	60.967.855	85,02
		Koordinasi	P2IPM	103.556.000	44.009.048	42,50
	2.18.02.1.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	P2IPM	727.635.443	506.878.722	69,66
	1.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	P2IPM	727.635.443	506.878.722	69,66
		Pelaksanaan Aceh Investment Planning Forum 2021	P2IPM	113.205.347	77.954.100	68,86
		Pemetaan Potensi Ekonomi dan Investasi 23 Kab/Kota di Aceh	P2IPM	68.566.000	53.384.255	77,86
		Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal 2022	P2IPM	2.640.000	1.800.000	68,18
		Pelaksanaan UKM Naik Kelas melalui Kerjasama Investasi (Partners-Up)	P2IPM	217.776.000	134.433.113	61,73
		Pelaksanaan Pitch Deck	P2IPM	70.730.347	55.739.300	78,81
		Koordinasi	P2IPM	231.077.749	159.927.954	69,21
		PPTK	P2IPM	23.640.000	23.640.000	100,00

D		Pameran Dalam Daerah	Promosi	137.810.000	110.434.800	80,14
E		Pameran Luar Daerah	Promosi	280.296.000	209.074.544	74,59
F		Tim Pengelola Perangkat Promosi Digital (Website, Media Sosial dan Customer Relation Management/CRM)	Promosi	21.500.000	17.200.000	80,00
	2.18.04	PROMOSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PERIZINAN	2.720.957.871	2.304.849.978	84,71
	2.18.04.1.01	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	PERIZINAN	2.720.957.871	2.304.849.978	84,71
1	2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non P	KEK ARUN	969.999.350	668.482.224	68,92
		Rapat Koordinasi Konsultasi Fasilitasi Perizinan	Kek Arun	116.500.000	118.293.792	101,54
		Bimtek LKPM Online	Kek Arun	19.550.000	14.550.000	74,42
		Sosialisasi KEK Arun	Kek Arun	27.900.000	24.825.000	88,98
		Pelatihan Masterlist	Kek Arun	19.550.000	15.900.000	81,33
		Kesekretariatan	Kek Arun	786.499.350	494.913.432	62,93
		Kantor dan Kendaraan Dinas	Kek Arun	361.099.350	157.113.432	43,51
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROMOSI	2.797.664.855	2.062.653.359	73,73
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang N	PROMOSI	2.797.664.855	2.062.653.359	73,73
1	2.18.03.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	PROMOSI	1.326.764.826	1.184.850.863	89,30
A		Penyediaan Bahan Promosi Investasi Aceh	Promosi	247.300.000	245.132.470	99,12
B		Penyusunan Data Materi Promosi Investasi Aceh	Promosi	331.404.000	326.757.892	98,60
C		Forum Bisnis Promosi Investasi Aceh (3 Kali)	Promosi	129.372.000	88.810.300	68,65
D		Biaya Penunjang Kegiatan Lainnya	Promosi	212.968.993	198.923.050	93,40
E		Kerjasama Ekonomi Regional IMT-GT	Promosi	370.511.833	290.718.306	78,46
1	5.1.02.01.01.0052	Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Materi Promosi Kab/Kota, Rapat IMT GT dan Koordinasi dengan Instansi terkait :	Promosi	34.020.000	17.515.000	51,48
2	5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Promosi	99.416.000	97.749.550	98,32
3	5.1.02.04.02.0001	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Promosi	237.075.833	175.453.756	74,01
F		Koordinasi	Promosi	35.208.000	34.508.845	0,98
	2.18.03.1.01.02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Promosi	1.470.900.029	877.802.496	59,68
A		Bisnis Forum Aceh - Singapore	Promosi	410.678.459	0	0,00
B		Bisnis Forum Investasi, Marketing Investment Indonesia (MII) Kawasan Asia, Timur Tengah, Benua Eropa dan Amerika/Benua Australia serta Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi	Promosi	142.053.570	141.817.089	99,83
C		Jasa Publikasi	Promosi	403.950.000	340.400.000	84,27

2	2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Modal	PERIZINAN	1.335.467.614	1.239.316.894	92,80
			BIDANG A	454.930.000	409.748.288	90,07
			BIDANG B	426.892.614	426.892.614	100,00
			BIDANG C	453.645.000	402.675.992	88,76
3	2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pe	BIDANG PENGADUAN	415.490.907	397.050.860	95,56
		Penyusunan Pergub Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penyusunan SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rapat Kerja Forum Komukasi PTSP	Bidang Pengaduan	54.397.907	50.148.250	92,19
			Bidang Pengaduan	13.500.000	13.500.000	100,00
		Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bidang Pengaduan	18.850.000	13.500.000	71,62
		Penyusunan Pergub Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Bidang Pengaduan	15.250.000	10.500.000	68,85
		Pendampingan e-Perizinan	Bidang Pengaduan	45.500.000	45.500.000	100,00
		Monitoring, Sosialisasi dan Penyuluhan, Koordinasi, dll	Bidang Pengaduan	219.523.000	219.523.000	100,00
		Rapat Koordinasi/Koordinasi Bidang PKPL	Bidang Pengaduan	48.470.000	44.379.610	91,56
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DALAK	1.406.574.150	1.265.563.395	89,97
	2.18.05.1.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	DALAK	1.406.574.150	1.265.563.395	89,97
1	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DALAK	347.217.257	246.922.672	17,55
		01. Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (2016-2020)	Dalak	25.650.000	-	0,00
		02. Penyusunan Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulanan	Dalak	1.000.000	1.000.000	0,07
		03. Penguatan Peran Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kab/Kota se Aceh	Dalak	63.700.000	-	0,00
		04. Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dalak	192.339.257	189.084.072	13,44
		05. Koordinasi dan Konsultasi dengan BKPM dan/atau Instansi Terkait Lainnya	Dalak	64.528.000	56.838.600	4,04
2	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalak	865.599.636	825.122.239	58,66
		01. Pengelolaan dan Pengadministrasi Keuangan Kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM	Dalak	35.499.000	35.498.800	2,52
		02. Rapat Taskforce/Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan	Dalak	5.100.000	4.600.000	0,33
		03. Rapat Dewan Kawasan KEK Arun - Lhokseumawe	Dalak	524.070.150	513.000.000	36,47
		04. Bimtek/Sosialisasi LKPM Online (DAK_Non Fisik)	Dalak	197.852.486	176.280.624	12,53
		05. Publikasi Media Cetak/Surat Kabar	Dalak	40.000.000	40.000.000	2,84
		06. Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalak	63.078.000	55.742.815	3,96

3	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalak	193.757.257	193.518.484	13,76
		01. Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalak	193.757.257	193.518.484	13,76
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DATIN	268.980.011	265.366.410	98,66
	2.18.06.1.01	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	DATIN	268.980.011	265.366.410	98,66
	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan In	DATIN	268.980.011	265.366.410	98,66
1		Verifikasi Data Penanaman Modal	DATIN	1.116.500	674.000	60,37
2		Seksi Analisa & Evaluasi Data Penanaman Modal (Investment Insight Report)	DATIN	1.116.500	650.000	58,22
3		Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal (Database, Website dan Sistem Informasi)	DATIN	137.246.500	132.275.000	96,38
4		Koordinasi	DATIN	129.500.511	134.192.410	103,62
JUMLAH TOTAL				51.609.324.408	45.298.986.685	87,77

2.1.1 Uraian Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

Dari 33 Sub kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPSTSP Aceh tahun 2021 terdapat 8 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu:

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.1.2 Uraian Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dari 33 Sub kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Aceh tahun 2021 terdapat 25 sub kegiatan yang memenuhi target.

2.1.3 Uraian Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dari 33 sub kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Aceh tahun 2021 tidak ada yang melebihi target kinerja.

2.1.4 Uraian Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Penyebab tidak tercapainya target kinerja karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Mengalami hambatan dalam proses pengurusan keuangan dan adanya pengembalian gaji 13 dan gaji 14 bagi pegawai negeri sipil.
2. Terlambatnya proses tender lanjutan pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP
3. Pada prinsipnya menjalin kerjasama adalah “building trust and beneficiary for both side” hingga memerlukan waktu lama untuk realisasi.
4. Kurang koordinasi dan tindak lanjut antara Bappeda dan DPMPTSP Kabupaten/Kota di daerah
5. Belum menggunakan dokumen perencanaan untuk acuan
6. Rancangan Peraturan Gubernur belum tersampaikan ke Biro Hukum karena substansi harus lebih intens dikoordinasikan dengan BPKA agar tidak tumpang tindih kebijakan fiskal.
7. Rancangan Peraturan Gubernur sudah melalui proses ke Kemendagri, namun penetapan rancangan pergub ditunda menunggu revisi Permendagri 19 tahun 2016
8. Komitmen Instansi Teknis terhadap Pemberian Pertimbangan teknis tepat waktu masih rendah dan hambatan regulasi.
9. Pada saat pelaksanaan kegiatan ada peserta dari SKPA Teknis beradu kegiatan
10. Belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan release/publikasi
11. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun

12. Padatnya jadwal Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
13. Masih rendahnya kesadaran pengusaha untuk mengikuti bimbingan teknis.
14. Tidak semua perusahaan membaca/mengetahui publikasi yg disampaikan
15. Bergesernya antara jadwal yg disusun diawal tahun dengan pelaksanaan
16. Izin kesehatan tidak diterbitkan selama covid berdasarkan SE Kemenkes RI
17. Penundaan sementara izin pendidikan SMK.
18. Pengalihan izin koperasi ke syariah
19. Perubahan Regulasi dan Aplikasi
20. Pertimbangan Teknis tidak sesuai SOP

Penyebab tercapainya target kinerja karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pengukuran dan penjahitan baju dinas dilaksanakan awal tahun
2. Perawatan Rutin dan Berkala
3. Adanya Tim Penyusunan Promosi dari Kab/Kota dan Tim Satgas Percepatan Investasi.
4. Tersedianya anggaran
5. Adanya dukungan dari lintas bidang dan pihak eksternal lainnya
6. Partisipasi dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dan melaksanakan bisnis matching
7. Peserta yang hadir antusias dan telah mempersiapkan diri secara matang
8. Data dan informasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kewenangan DPMPTSP Aceh, telah disetting menjadi informasi yang dapat dipantau secara realtime oleh seluruh jajaran Pejabat di DPMPTSP Aceh, serta rutin dikawal melalui konfirmasi dalam proses penyusunannya. Kelengkapan Data Tahun Anggaran 2021, akan rampung pada Januari 2022.
9. Upaya untuk mengharmonisasikan pengelolaan data Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha antara Provinsi dan Kabupaten/Kota telah maksimal dilakukan, diantaranya melalui pembinaan ke daerah, WAG dan penyampaian informasi yang komunikatif.
10. Sudah tersedianya support data yang mudah dan lengkap dalam bentuk database
11. Pengendalian Output Internal yang tepat waktu dan mutu
12. Adanya dukungan yang baik dari seluruh stakeholder, serta tim pengelola yang solid.
13. Sudah di terapkan permohonan melalui sicantik cloud kepada instansi teknis
14. Ada perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan.

2.1.5 Uraian Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Restra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Penanaman Modal di Provinsi Aceh.

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Frekuensi perjalanan dinas jangan banyak dilakukan pada akhir tahun
2. Menyesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengembalian Gaji
3. Keikutsertaan ASN utk Pelatihan perlu ditingkatkan
4. Percepatan kelengkapan dokumen dan proses tender di laksanakan pada awal tahun
5. Kebutuhan peralatan pendukung kerja ASN menyesuaikan kembali anggaran di kantor baru

6. Kendaraan dinas diservis secara berkala menghindari kerusakan, dan melapor bila ada kerusakan
7. Agar kegiatan dijalankan sesuai jadwal
8. Output yang dicapai sesuai ketersediaan anggaran
9. Materi bahan promosi harus di persiapkan lebih awal dan perbaiki kualitas.
10. Agar lebih selektif dalam pemilihan acara pameran
11. Dukungan lintas bidang agar anggaran dapat ditingkatkan.
12. Rutin koordinasi, bangun networking dan optimis serta PROMAG (pro aktif, massive dan agresive)
13. Sosialisasi dan pendampingan lebih intensif
14. Sosialisasi dan tertib dalam perencanaan
15. Melakukan pendampingan kabupaten/kota utk perbaikan Indeks daya Saing Investasi
16. Sosialisasi kegiatan Indeks daya Saing Investasi
17. Koordinasi lebih aktif dengan dinas terkait
18. Perlu melibatkan konsultan pendamping dalam seleksi UKM
19. Perlu persiapan dari sekarang untuk mendapatkan UKM yang lebih siap mendapatkan pendampingan
20. Pendampingan yang lebih matang untuk melakukan Pitching
21. UKM yang potensial dan siap untuk bermitra
22. Koordinasi lebih intensif
23. Membangun penguatan komitmen terhadap implementasi SOP
24. Perencanaan kegiatan harus lebih matang.
25. Informasi kepada SKPA lebih awal.
26. Persiapan matang yang dilakukan sangat membantu menyukseskan acara
27. Komitmen terhadap Implementasi SOP Perlu Ditingkatkan
28. Optimalisasi penggunaan output pada aplikasi sicantik cloud, sehingga dapat menampilkan rekapitulasi data yang lengkap.
29. Evaluasi berjenjang secara periodik terkait kesesuaian data PB dan Non PB dengan ketentuan yang berlaku.

30. Struktur kelembagaan DPMPTSP kabupaten/kota yang berbeda, sehingga perlu pendataan pelaksana sejak awal.
31. Penguatan SDM Pelaksana di Bidang Data dan informasi agar output kegiatan dapat berjalan lebih maksimal.
32. Untuk kelancaran data, Sinergi dan Komunikasi antar Bidang perlu dioptimalkan (jika perlu dibentuk SOP)
33. Peningkatan kapasitas, Wawasan dan SDM internal (analisis) perlu ditingkatkan (Bimtek, training)
34. Fungsi koordinasi lintas bidang harus lebih dikuatkan.
35. Perlu didukung dengan tim kreatif dan perlengkapan yang memadai.
36. Adanya perencanaan yang matang dalam proses pengajuan pembuatan aplikasi dari masing-masing stakeholder yang membutuhkan.
37. Fungsi koordinasi lintas bidang harus lebih dikuatkan.
38. Berkomitmen untuk menjalankan aplikasi yang telah diajukan.
39. Adanya evaluasi berjenjang secara periodik terkait penggunaan aplikasi yang telah dibuat.
40. Perlu dialokasi dana untuk kegiatan publikasi (press release)
41. Menyusun renja secara efektif
42. Perlu lebih intens utk mendeteksi permasalahan yg dihadapi perusahaan
43. Perlu lebih diefektifkan seluruh anggota sekretariat untuk mendukung dewan kawasan
44. Perlu pemanfaatan media lain untuk lebih efektif dalam penyampaian informasi
45. Perlu sosialisasi yang lebih intens
46. Perlu konsistensi pelaksanaan terhadap rencana yang telah disusun.
47. Regulasi baru
48. Perlu adanya sosialisasi dari Dinas Teknis Koperasi Syariah
49. Permohonan langsung ke OPD teknis/ OPD berkantor di DPMPTSP
50. Perlu Bimtek operator sicientik cloud perbidang
51. Internet yang cukup
52. Identifikasi masalah, sasaran jelas output, Studi banding
53. Mengikuti Bimtek Teknis Pelayanan

2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (Tahun Berjalan) terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

2.2.1 Kajian terhadap Capaian Kinerja berdasarkan Indikator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang telah tertuang dalam RPJMA 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022, yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan konsumen.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga. Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing. Pada tahun 2017 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing sebanyak 31 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yaitu 70 investor dan kemudian menjadi 173 Investor pada tahun 2020. Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 346 investor menjadi 211 investor pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yakni sebanyak 376 investor hingga 2241 investor pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2017-2021

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)
2017	31	149,089	336	1,680,961
2018	29	48,016	211	1,232,545
2019	70	1,196,941	376	4,615,150
2020	61	737,974	2241	8,373,043
2021	51	1,399,697	1003	7,059,417

Sumber : DPMPTSP Aceh, 2022

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah investor berkaitan erat dengan besarnya nilai investasi yang terealisasi di Aceh. Dalam periode tahun 2016-2020 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh juga mengikuti tren fluktuatif bahkan cenderung menurun sampai pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan secara tajam yaitu dari 87.80 juta US\$ menjadi 3,58 US\$, namun pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 79.79 Juta US\$. Sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun yaitu menjadi 51,24 Juta US\$. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami perkembangan yang kurang baik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun terjadi peningkatan secara signifikan mulai tahun 2019. Pada tahun 2016 – 2018 dengan besaran yaitu 3,79 triliun rupiah, 1.68 triliun rupiah dan hanya 1.23 triliun rupiah pada tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,61 trilyun rupiah dan 8,73 trilyun rupiah pada tahun 2020 Ada beberapa penyebab turunnya realisasi Inventasi di Aceh sejak tahun 2017-2018 diantaranya Pembangunan pabrik Semen Laweung masih sangat lambat atau tidak ada proses kemajuan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur/Kamirzu proses pembangunan kontruksinya belum berjalan sesuai perencanaan awal. beberapa pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo juga melambat. hal ini disebabkan pada saat tersebut (tahun 2017) belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. sehingga proses pembangunannya terkendala. Selain hal tersebut menurunnya realisasi Investasi di Aceh juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Ladong Aceh Besar maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan

Aceh Utara. Namun mulai tahun 2019 terjadi kenaikan nilai realisasi investasi yang begitu signifikan karena iklim investasi dirasakan relatif membaik di Aceh. Terlaksananya realisasi investasi di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan publik pada lintas sektor. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pemahaman secara holistik kepada semua sektor. Pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami trend kenaikan positif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan LKPM melalui SPIPISE.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing.
- d. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja DPMPTSP Aceh lainnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Kajian survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan 2 (dua) kali pada tahun 2021 menunjukkan trend peningkatan. Pada semester pertama, nilai indeks kepuasan

masyarakat yang diperoleh sebesar 87,28 dengan jumlah responden sebanyak 267 orang. Pada semester kedua, nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 87,39 dengan jumlah responden sebanyak 270 orang.

Ada 3 Unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah, yang pertama Jangka Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,31. Selanjutnya prosedur 3,37 dan persyaratan dengan nilai yang sama yaitu 3,37, walaupun tiga unsur tersebut termasuk dalam 3 terendah namun tetap dalam katagori “Baik”

Sedangkan tiga unsur layanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif dengan nilai 3,74, penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 3,69 serta maklumat pelayanan dengan nilai 3,68 dengan kategori “Sangat Baik”.

2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat-perangkat Daerah (Tabel T-C 30)

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut (terlampir).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program Lintas Pemerintahan

Secara Umum, Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan Kabupaten/kota tidak jauh berbeda walaupun di beberapa nomenklatur terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur kegiatan terkait hal tersebut adalah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kendala koordinasi dan sinergi selama ini lebih disebabkan adalah ketidaksamaan visi, fokus dan prioritas daya saing investasi atau kemudahan berusaha di tingkat lintas pemerintah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi dan penyamaan persepsi dan komitmen yang mengikat dalam mendorong prioritas penanaman modal di Aceh.

2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kajian identifikasi hambatan berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh menemukan beberapa hambatan berusaha di Aceh. Diantaranya adalah persepsi bahwa proses perizinan yang sering berubah. Hal ini juga disebabkan oleh perubahan rezim perizinan menjadi berbasis risiko. Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risk Base Approach (RBA) masih belum sempurna sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perizinan berusaha. Di samping itu, perubahan sistem ini memerlukan sosialisasi yang intensif bagi aparatur perizinan dan juga pelaku usaha. Hingga kini masih banyak aparatur perizinan baik di DPMPTSP dan SKPA teknis masih belum memahami secara komprehensif tentang sistem ini.

Selanjutnya, kewenangan perizinan yang asimetris di Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menimbulkan ketidakpastian dan dualisme hukum. Hal ini disebabkan kewenangan perizinan yang diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2006 tersebut masih banyak belum memiliki peraturan teknis turunan yang mengatur norma, standar dan prosedur dari perizinan yang diberikan tersebut. Belum sepenuhnya kesamaan visi terkait fasilitasi investasi atau berusaha di tengah masyarakat menjadikan permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kemudahanberbisnis (*ease of doing business*) di Aceh.

2.3.3 Uraian tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat. Pencapaian kinerja ini akan berpengaruh atau berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh.

Visi pembangunan Provinsi Aceh yaitu: “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Dalam visi tersebut terdapat 3 komponen visi, yaitu damai, sejahtera dan pemerintah yang bersih, adil dan melayani. Kinerja DPMPTSP secara langsung akan berdampak pada pencapaian

komponen visi sejahtera dan pemerintah yang bersih, adil dan melayani. Sedangkan visi damai dapat dicapai secara tidak langsung oleh kinerja DPMPTSP Aceh.

Kinerja realisasi investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi merupakan komponen pembentuk PDRB Aceh. Selain itu, realisasi investasi juga menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah komoditas dan jasa unggulan Aceh sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

Realisasi investasi juga akan mendorong keberhasilan misi pembangunan Aceh seperti Misi 6. Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan; Misi 7 Menyediakan Sumber Energi Bersih dan Terbarukan; Misi 8 Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif; dan Misi 10 Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kinerja utama DPMPTSP Aceh lainnya yang berkontribusi pada pencapaian visi adalah indeks kepuasan masyarakat. Indeks ini merupakan ukuran dari hadirnya komponen visi pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Kinerja ini sekaligus menjadi tujuan reformasi birokrasi sesuai dengan Misi 1 Pemerintah Aceh, yaitu Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Komponen visi Damai dapat diperoleh apabila seluruh masyarakat Aceh mendapatkan pendapatan yang layak serta tidak merasa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik sebagaimana tersurat dalam kehadiran pemerintah yang adil dan melayani.

2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan layanan DPMPTSP berasal dari internal maupun eksternal. Pelayanan belum tepat waktu masih menjadi temuan sebagai indikator terendah dalam survey kepuasan masyarakat, meski secara keseluruhan masih dalam kategori baik. Selain itu, budaya kerja yang melayani masih perlu ditingkatkan. Kemampuan menyusun proyek investasi yang siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer-IPRO) dan mempromosikan IPRO juga menjadi tantangan internal.

Secara eksternal, tantangan yang dihadapi adalah persaingan dengan pemberi layanan di provinsi lain. Pelayanan yang baik dan jelas akan menyebabkan pelaku usaha untuk memilih daerah yang memiliki pelayanan penanaman modal dan perizinan yang lebih prima.

Adapun peluang untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal di Aceh adalah ketersediaan fasilitas informasi teknologi atau digitalisasi. Perkembangan ini dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk mendapatkan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Selain itu, kecenderungan global terkait investasi hijau dan peningkatan pasar halal dapat menjadi peluang bagi DPMPTSP Aceh untuk dapat menarik lebih banyak investasi. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki kualitas lingkungan yang relatif baik dan memiliki ekosistem ekonomi halal yang relatif lengkap.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Penting

Dengan menggunakan alat analisis SWOT, isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja DPMTSPSP Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan penanaman modal.

Kualitas dan pelayanan penanaman modal perlu ditingkatkan dengan prinsip kemudahan, kecepatan dan kepastian (ease of doing business). Perkembangan teknologi digital dan kondisi pandemi Covid 19 mendorong proses transformasi digital makin cepat dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan penanaman modal. Sosialisasi aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online merupakan salah satu inovasi yang harus dilakukan pada tahun 2023. Selain itu, strategi promosi menggunakan teknologi digital seperti webinar atau virtual expo adalah pilihan yang lebih murah dan efektif disbanding dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada kehadiran fisik (physical presence).

Selain itu informasi potensi dan peluang investasi perlu dikemas dengan menarik sehingga menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan (investment project ready to offer) sehingga memudahkan calon investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Baik Calon Investor dan Investor yang sudah ada (existing) perlu dilayani secara baik agar dapat segera merealisasikan dan mengembangkan proyek

investasi yang sudah ada. Konsep Customer/Investor Relationship Management merupakan hal yang krusial dilakukan yang didukung oleh Sistem Informasi Penanaman Modal yang berbasis digital dan daring.

2. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan dan sektor strategis

Berdasarkan prinsip halal dan hijau Hilirisasi merupakan tema utama dari pembangunan ekonomi Aceh. Sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal. Bahwa Ekonomi Aceh diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Aceh memiliki komoditas unggulan yang memiliki kualitas tinggi sehingga peningkatan produktivitas dan nilai tambah akan dapat menyejahterakan rakyat Aceh secara efektif. Sektor strategis investasi yang dimaksud adalah sektor pangan, bioteknologi/bio-farmaka dan sektor teknologi digital (e-commerce).

Untuk mendorong hilirisasi melalui penanaman modal, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya Menyusun peta hilirisasi untuk komoditas unggulan daerah, meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan, mengembangkan kapasitas dan skala usaha serta daya saing UKM/IKM di dalam rantai nilai komoditas unggulan dan sektor strategis, mempromosikan peluang investasi terutama pada rantai nilai komoditas unggulan dan sektor strategis yang masih belum ada dan melakukan fasilitasi perluasan pasar baik domestik dan ekspor. Aceh sebagai provinsi Syariah memiliki kewajiban untuk memastikan segala produksi yang dilakukan di provinsi ini telah mengikuti prinsip-prinsip halal sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Apalagi pangsa pasar produk halal atau ekonomi halal di dunia mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tematik halal dapat menjadi sumber daya saing bagi Aceh dalam menarik investasi. Untuk itu, memastikan proses dan produk bersertifikasi halal hingga penyediaan instrumen investasi berbasis syariah merupakan sebuah prioritas.

Dunia telah meratifikasi komitmen pembangunan global, yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan pembangunan ini berjumlah 17. Investasi atau penanaman modal dimandatkan pada tujuan 1 (Pengurangan Angka Kemiskinan -

Zero Poverty), Tujuan 2 (Pengurangan Angka Kelaparan-Zero Hunger), Tujuan 7 (Energi Bersih), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan Tujuan 17 (Kemitraan Internasional). Untuk 27 memobilisasi dana global, diperlukan perluasan informasi peluang dan investasi hijau di Aceh bagi donor atau investor hijau. Dalam melaksanakan strategi ini, dapat dilakukan kemitraan atau kolaborasi dengan Lembaga non-pemerintah dan Universitas yang bergerak di sektor investasi hijau.

3. Membangun Infrastruktur Pendukung Investasi

Pembangunan Infrastruktur ditujukan untuk memudahkan dan mendorong produktifitas dan nilai tambah serta efisiensi dari sebuah proses penanaman modal. Infrastruktur pendukung investasi berupa infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, Pelabuhan dan bandara udara serta telekomunikasi. Selanjutnya infrastruktur yang mendorong produktifitas komoditas seperti irigasi dan infrastruktur energi serta air bersih juga perlu terus dibangun. Pembangunan infrastruktur ini akan membuat investasi lebih feasible sehingga dapat menarik minat investor. Selain itu juga pembangunan infrastruktur diatas akan meningkatkan kualitas hidup yang akan menarik juga talent atau SDM yang dibutuhkan dalam proses investasi.

4. Meningkatkan iklim Ketenagakerjaan yang kondusif

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif merupakan salah satu penarik investasi. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, sertifikasi dan pemagangan (3 in 1) berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri/investasi (DUDI) merupakan hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya, pelaksanaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh DUDI juga dapat diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui 3 in 1 diatas.

Selain itu, Pemerintah Aceh perlu mendorong hubungan industrial yang harmonis antara Investor dan pekerja melalui sosialisasi ketentuan ketenakerjaan baik kepada investor dan pekerja. Peningkatan layanan ketenagakerjaan tentang tenaga kerja asing juga perlu dilaksanakan dengan mempedomani aturan ketenakerjaan yang berlaku.

5. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Investasi

Saat ini Aceh memiliki 4 Kawasan Peruntukan Investasi yang relative clear and clean dalam menerima investasi. 4 Kawasan tersebut adalah KEK Arun

Lhokseumawe, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo. Pengembangan Kawasan ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur dalam Kawasan dan luar Kawasan dan pengembangan kelembagaan pengelola 4 kawasan tersebut. Selain 4 kawasan tersebut, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan Kawasan peruntukan investasi lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh mengamanatkan pembangunan 3 (tiga Kawasan industri), 6 (enam) sentra industry kecil dan menengah dan Kawasan-kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berbasis korporasi. Kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi lokasi prioritas dalam menarik investasi dalam rangka hilirisasi ekonomi Aceh.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Uraian Tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan penting jika terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja

Rekapitulasi hasil analisis Rancangan Awal RKPA dengan kebutuhan DPMPTSP Aceh sesuai dengan perkembangan yang ada dalam bidang penanaman modal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan oleh Pemangku Kepentingan

2.5.1 Uraian tentang proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Proses pengusulan program/kegiatan dilaksanakan melalui beberapa modalitas seperti forum perencanaan investasi (Investment Planning Forum), diskusi kelompok terfokus dan juga forum bisnis.

2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan tersebut dengan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Rekapitulasi tentang usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel T-C. 32 (Terlampir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Konsistensi kebijakan investasi harus dipastikan didalam dokumen perencanaan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal. Dari sisi kebijakan nasional, Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memberikan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. 5 arahan tersebut adalah 1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2). Pembangunan Infrastruktur; 3). Penyederhanaan Regulasi; 4). Penyederhanaan Birokrasi; dan 5). Transformasi Ekonomi.

Kesemua arahan tersebut merupakan faktor daya saing dan daya tarik investasi di Indonesia. Secara spesifik, investasi menjadi prioritas dalam agenda pembangunan pertama yang ditetapkan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Agenda ini menempatkan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Dalam RPJMN 2020-2024, Investasi diharapkan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu 2020-2024, Ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh dalam kisaran 5,7-6,0 persen. Selanjutnya, untuk memungkinkan pencapaian tersebut, pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto-PMTB) diharapkan tumbuh 6,6 – 7,0 persen. Pencapaian target pertumbuhan investasi diraih melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, mewujudkan kepastian hukum dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Rencana Umum Pengembangan Penanaman Modal (RUPM) Aceh Periode 2014-2025 ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014. RUPM memiliki 8 arah kebijakan yaitu : 1). Perbaikan Iklim Penanaman Modal, 2) Persebaran Penanaman Modal, 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal; 5) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); 6) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 7) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau

Insentif Penanaman Modal; dan 8). Promosi Penanaman Modal. Dari sisi pentahapan, periode saat ini memasuki fase ke-tiga (2020- 2025), yaitu Pengembangan Industri Berdaya Saing dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry). Terdapat 3 fokus industri yang menjadi sasaran investasi, yaitu agroindustry, infrastruktur dan energi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Periode 2017-2022 ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Visi Pembangunan Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Untuk melaksanakan visi tersebut, terdapat 10 misi yang harus dilaksanakan; yaitu: 1). Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani; 2). Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlus sunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain; 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki; 4). Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional; 5). Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi; 6). Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 7). Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan; 8). Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif; 9). Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence-based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan; 10). Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam operasionalisasi RPJMA 2017-2022, Pemerintah Aceh menetapkan 15 Program Unggulan yang disebut dengan Program Aceh Hebat.



Gambar 3.1. Program Unggulan dalam RPJMA 2017-2022

Secara spesifik, Arah kebijakan penanaman modal di RUPM berada pada lintas misi dan program unggulan. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal merupakan agenda pembangunan untuk misi pertama RPJMA dan program Aceh Peumulia. Selanjutnya, relevansi RUPM dan RPJMA serta Program Unggulan Aceh Hebat dapat dilihat dari tabel berikut :

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023, Pemerintah Aceh memiliki tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 disusun dalam konteks maraknya pandemi COVID 19 sehingga fokus kebijakan pemerintah Aceh pada tahun 2023 adalah pemulihan pembangunan yang terdampak oleh wabah virus ini. Prioritas Pembangunan Aceh tahun 2023 adalah: 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan indikator (a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (b) Pertumbuhan PDRB, (c) Indeks Gini; 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator (a) Persentase Penduduk Miskin dan (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

Rencana Pengembangan Penanaman Modal (RP2M) Tahun 2023 akan menjadikan kebijakan perencanaan daerah di dalam RUPM 2014-2020, RPA 2023- 2026 dan RKPA 2023 sebagai dasar perencanaan penanaman modal Aceh di tahun 2023, terutama mendorong penanaman modal berkontribusi pada pencapaian tujuan prioritas Pembangunan Aceh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan realisasi investasi dan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berusaha di Aceh. Berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Thread) dari isu strategis yang diidentifikasi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra) Tahun 2023-2026, diperoleh lima sasaran dan strategi yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja atau tujuan penanaman modal di tahun 2023, yaitu :

1. Penguatan kapasitas koordinasi pengembangan penanaman modal

Penguatan kapasitas koordinasi ini dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal yang diperkuat melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur untuk memastikan keterpaduan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diperlukan kelompok kerja yang merepresentasikan lintas sektor dan dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah yang bertanggung jawab ke Gubernur.

Ketimpangan wilayah dan sektor investasi dapat diperbaiki melalui peningkatan daya saing investasi di seluruh kabupaten/kota. Untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota

meningkatkan daya saing pemetaan daya saing investasi perlu juga diberikan insentif berdasarkan peningkatan daya saing investasi yang diukur dengan indeks daya saing investasi.

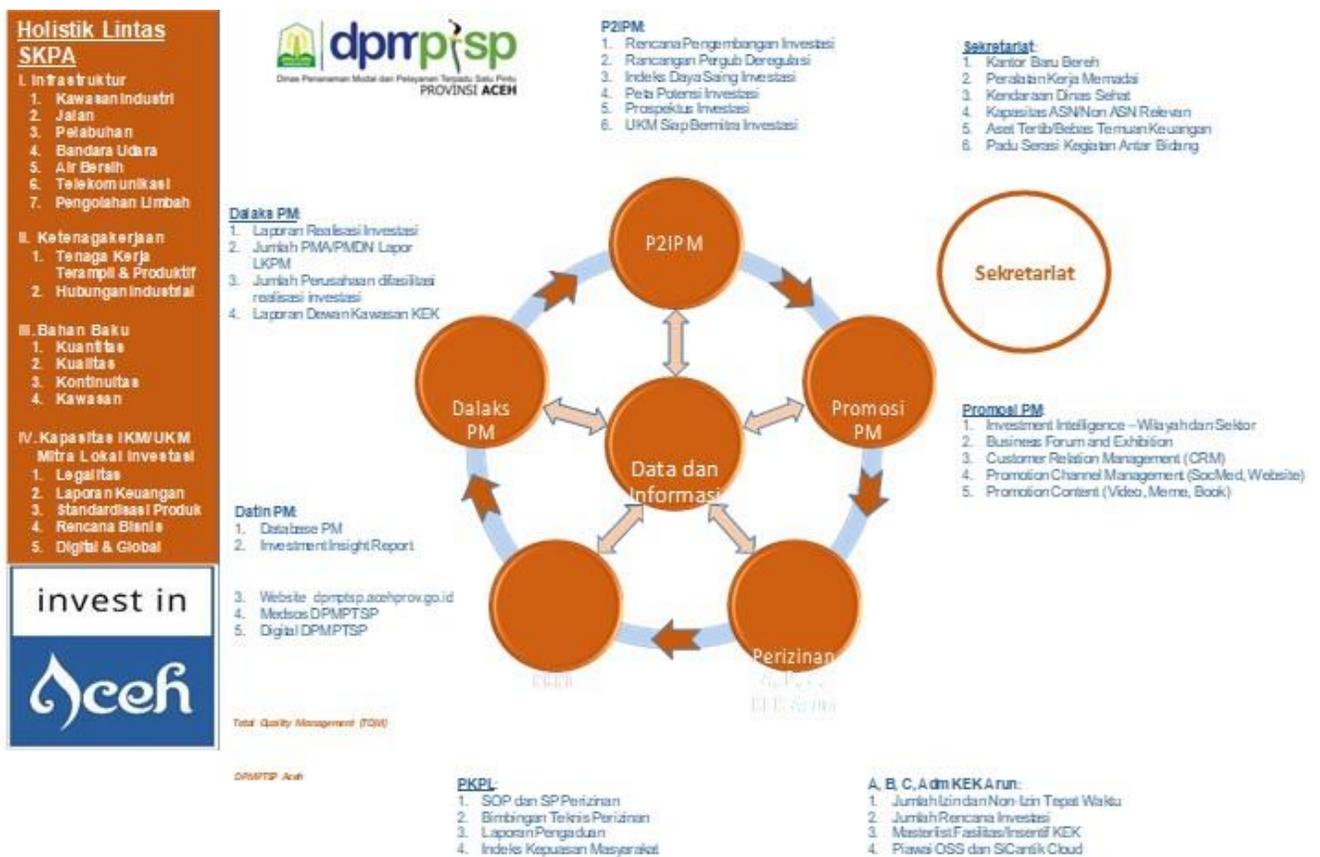
2. Pelaksanaan promosi penanaman modal secara tematik, berbasis target investor dan digital. Efektifitas promosi penanaman modal dicapai melalui penyusunan prospektus proyek investasi yang siap ditawarkan (*investment project ready to offer*). Selain itu pelaksanaan promosi perlu dilakukan secara tematik dan fokus, terutama pada sektor yang potensial namun masih rendah realisasi investasinya. Pendekatan tematik dan fokus tersebut akan meningkatkan minat investasi di sektor-sektor yang timpang sehingga pemerataan investasi akan terjadi.

Selanjutnya, promosi juga perlu dilaksanakan dengan melakukan investigasi terkait kecenderungan calon investor melalui kegiatan *investment intelligence*. Dalam pelaksanaan promosi, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi promosi.

3. Optimalisasi perizinan secara digital, pasti dan tepat waktu. Optimalisasi ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perizinan, penyusunan dan sosialisasi Standar Prosedur Operasi (SPO), pendampingan perizinan melalui klinik perizinan dan pengembangan system pemantauan perizinan (*permit tracking system*).
4. Pelayanan terhadap Investasi
Diskrepansi antara rencana investasi yang ditandai dengan permohonan izin dan realisasi investasi memiliki angka yang besar. DPMPTSP Aceh perlu melakukan pengawalan dan pelayanan bagi investor agar segera merealisasikan rencana investasi melalui kegiatan debottlenecking termasuk perubahan regulasi yang dianggap tidak pro-investasi.
5. Penguatan Data dan Informasi
Data dan informasi merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik sehingga adanya sebuah bidang yang mengelola data tersebut dan mempublikasikannya ke masyarakat yaitu Bidang Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan subkegiatan dan prioritas pada tahun anggaran 2023 selengkapnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Berbagai output yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan bagian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Ilustrasi Output Rincian Sub Kegiatan DPMTSP Tahun 2023

Untuk tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merencanakan 6 (enam) program terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja SKPA ini pada tahun pertama RPA Aceh Tahun 2023-2026 dapat memberi manfaat bagi perbaikan citra Aceh sebagai salah-satu

daerah tujuan investasi di Indonesia. Diharapkan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2023.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table T (Terlampir)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan dokumen perencanaan dengan beberapa sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa surat-menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi
3. Program Promosi Penanaman Modal
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Promosi Penanaman Modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan dan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Non Perizinan penanaman modal, dengan subkegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengelola data dan sistem informasi penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Aceh dalam Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target realisasi investasi di tahun 2023 sebagaimana telah diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPA) 2023-2026.

Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai benchmarking dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Namun harus dipahami bahwa realisasi investasi merupakan akumulasi dari berbagai faktor dan kontribusi, termasuk kontribusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Gampong. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 hanya mencakup rencana intervensi dari Pemerintah Aceh. Kedepan, dapat disusun dengan melibatkan pihak lintas tingkat pemerintahan sehingga integrasi dapat terjadi dan menambah kekuatan atau efektifitas program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan untuk menarik investasi di Aceh.

5.2 Catatan Penting yang perlu mendapatkan Perhatian

Keterkaitan kinerja antar-tahun anggaran dapat dilihat melalui laporan kinerja akhir tahun. Karena itu, Rencana Kerja ini dapat menjadi salah-satu alat evaluasi terhadap target dan realisasi kerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

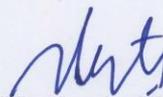
Hal yang sangat penting adalah bahwa dunia usaha dan masyarakat luas dapat terus memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh guna peningkatan nilai realisasi investasi Aceh. Diharapkan agar keluaran (*output*) Rencana Kerja pada tahun pertama RPA Aceh Tahun 2023-2026 ini memberi manfaat nyata (*outcome*) bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2023 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2023. RKA yang telah disetujui oleh TAPA dan DPRA dalam pembahasan RAPBA akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai penjabaran dari APBA Aceh tahun 2023.

Banda Aceh, Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**



Marthunis, ST, D.E.A.
Pembina Utama Muda
Nip. 19770805 200312 1 005

Tabel T.C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun N-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020					Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				(4)			(5)		(6)	(7) = (6/5)	(8)		(9) = (4+6+8)	(10) = (9/3)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(5)		(6)	(7) = (6/5)		(8)		(9) = (4+6+8)	(10) = (9/3)
1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)													
1.02.12.01.08.16.018	Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	- Tersusunnya Renja, RKA, DPA serta Lakip DPMPSTP Aceh	32	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100%			4	Dokumen	13%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Serta kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur													
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	5	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Tersedianya Dokumen Penganggaran (RKA dan DPA)	30	Dokumen	2	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	6	Dokumen	6	Dokumen	20%
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	25	Dokumen	1	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	6	Dokumen	24%
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	70	Bulan	14	14	Bulan	14	Bulan	100%	14	Bulan	28	Bulan	40%
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Terpenuhinya pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	14	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	26	Bulan	43%
2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	5	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Buku Besar; Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	24	Buku	8	24	Buku/Lapora	8	Buku/Lapora	33%	8	Buku/Lapor	16	Buku/Lapor	67%
1.02.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi													
1.02.12.01.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan pada pelatihan, bimtek dan kursus kursus	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%	0	Bulan	12	Bulan	20%
1.02.12.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan													
1.02.12.01.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	802	stel		153	stel	152	stel	99%			305	stel	38%
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	802	stel	153	162	stel	162	stel	100%	0	stel	315	stel	39%
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Keikutsertaan pada pelatihan, bimtek dan kursus kursus - Terlaksananya Pelatihan, Penjajakan, Kerjasama, Bimtek dan Kursus-kursus Singkat - Terlaksananya Kegiatan In House Training	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
			50	Orang	0	10	Orang			0%	10	Orang	0	Orang	0%
			300	orang		200	Orang			0%	200	Orang	0	Orang	0%

1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya barang kebutuhan penerangan kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Sewa Gudang	60 5	Bulan Unit	12 1	12 1	Bulan Unit	12 1	Bulan Unit	100% 100%	12 1	Bulan Unit	24 2	Bulan Unit	40% 40%
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
1.02.12.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan koordinasi dan kinerja aparatur	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat serta tamu - Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat serta tamu - Tersedianya Masker (Covid)	60 60 2000 300	Bulan Bulan Porsi Pack	12 12 0 0	12 12 0 0	Bulan Bulan Porsi Pack	12 12 0 0	Bulan Bulan Porsi Pack	100% 100% #DIV/0! #DIV/0!	12 12 1000 150	Bulan Bulan Porsi Pack	24 24 0 0	Bulan Bulan Porsi Pack	40% 40% 0% 0%
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar / majalah	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terpenuhi Informasi Terkini dan terupdate melalui media cetak - Terpenuhi Informasi Terkini dan terupdate melalui media cetak	60 18000	Bulan Exemplar	12	12	Bulan	12	Bulan	100% 100%	9.564 9.564	Exemplar Exemplar	24	Bulan	40%
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.02.12.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mengikuti rapat koordinasi dalam dan luar daerah	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
1.02.12.01.01.01.022	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Tamu ke Daerah - Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Tamu ke Daerah	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	9	Kali	24	Bulan	40%
1.02.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur													
1.02.12.01.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	2	Gedung		1	unit	1	gedung	100%			1	gedung	50%
1.02.12.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	9	Unit		9	Unit	7	Unit	78%			7	Unit	78%
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2.18.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP - Tersedianya Konsultan Pengawas Bangunan Gedung Kantor	2 2	Gedung Paket	1 1	1 1	Gedung Paket	1 1	Gedung Paket	100% 100%	1 1	Paket Paket	2 2	Gedung Pack	100% 100%

1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi															
1.02.12.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda-benda pos lainnya dan pengiriman paket	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	800	Kg	24	Bulan	40%	
		- Tersedianya Peranko, Materai, Wesel Pos dan Pos Lainnya	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	2000	Lembar	24	Bulan	40%	
		- Tersedianya Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	160	Kg							800	Kg				
		- Tersedianya Peranko, Materai, Wesel Pos dan Pos Lainnya	4000	Lembar							2000	Lembar				
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.02.12.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa utility kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Anggaran untuk Tagihan Telepon, Listrik, Speedy/Internet dan Tagihan Air	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%	
1.02.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.02.12.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107)	500	Botol							250	Botol				
		- Tersedianya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3	Paket							1	Paket				
		- Tersedianya Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah - Tipe A dan Jasa Keamanan	4	Jasa							2	Jasa				
		- Tersedianya Sarung Tangan Plastik	175	Kotak							87	Kotak				
1.02.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
1.02.12.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Pemeliharaan Mobil Dinas Serta Pajak Kendaraan	100	%		15	Unit	15	Unit	100%			15	Unit	15%	
		-Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 serta Pajak Kendaraan	100	%		11	Unit	11	Unit	100%			11	Unit	11%	
1.02.12.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawat dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	Bulan		12	Bulan	12	Bulan	100%			12	Bulan	20%	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pemeliharaan Mobil Dinas dan kendaraan Roda 2 Serta Pajak Kendaraan	60	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100%			24	Bulan	40%	
		- Tersedianya Anggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	100	%							34	Unit				
		- Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	100	%							8	Unit				
		- Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	100	%							8	Unit				
1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
1.02.12.01.01.16.025	Pemberdayaan Usaha	- Terlaksananya koordinasi Kemitraan UMKM dan Perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD	20	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0%			0	Laporan	0%	
1.02.12.01.01.16.026	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	- Terlaksananya FGD Penyusunan Rancangan Awal Pergub tentang Penggunaan Lahan Milik Daerah untuk Investasi	150	Orang		90	Orang	25	Orang	28%			25	Orang	17%	
		- Terlaksananya Rapat Deregulasi Penanaman Modal	150	Orang		75	Orang	50	Orang	67%			50	Orang	33%	

1.02.12.18	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi															
1.02.12.18.001	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dialog Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Aceh	250	Orang		115	Orang	115	Orang	100%			115	Orang	46%	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi														
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi															
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Terkait Penanaman Modal - Terlaksananya Sosialisasi peraturan deregulasi penanaman modal	2 40	Rancangan Peraturan Orang	0 0	1 0	Rancangan Peraturan Orang	1 0	Rancangan Peraturan Orang	100% -	1 40	Rancangan Peraturan Orang	1 0	Rancangan Peraturan Orang	50% 100%	
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi															
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	- Tersedianya Dokumen RP2M Tahun 2023 - Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	1 0	Buku Dokumen	1 0	1 0	Buku Dokumen	1 0	Buku Dokumen	100% 0%	1 1	Buku Dokumen	2 0	Buku Dokumen	100% 100%	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	- Terpetakan Peta Potensi dan Profil Ekonomi 23 Kab/Kota - Tersedianya Kajian Investasi - Jumlah data/direktori UMKM yang potensial untuk bermitra - Terlaksananya Fasilitas Mitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor)	1 2 1 250	Buku Kajian buku Orang	1 0 1 100	1 0 0 50	Buku Kajian Orang	1 0 0 50	Buku Kajian Orang	80% 0% 0% 100%	1 2 0 -	Buku Kajian Orang	2 0 1 150	Buku Kajian Orang	100% 100% 100% 60%	
		- Tersedianya Prospektus UMKM (UMKM Naik Kelas)	8	UMKM		4	UMKM	8	UMKM	200%	4	UMKM	8	UMKM	150%	
1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
1.02.12.01.01.16.021	Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah	- Regional Investment Forum (RIF) - Pameran Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri - Misi Investasi Luar Negeri/Kerjasama Kawasan IMT-GT - Cetak Baliho Investasi untuk Publikasi (13 Titik x 1 Kali)	18 30 50 25	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kali		1 2 2 13	Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali	0 2 2 10	Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali	0% 100% 100% 77%			0 2 2 10	Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali/Kegiatan Kali	0% 7% 4% 40%	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi														
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah															
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	- Tersedianya Kajian Analisis Investment Intelligence - Analisis Berdasarkan Negara Target	3	Dokumen							1	Dokumen	0	Dokumen	0%	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	- Terselenggaranya Koordinasi dan Promosi Investasi - Terlaksananya Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue - Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Sosial - Tersedianya Materi/Bahan Promosi Investasi Aceh	5 2 25 12	Kegiatan Kegiatan Iklan/Kegiatan Dokumen		2 1 2 3	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen	7 1 30 7	Kegiatan Kegiatan Iklan/Kegiatan Dokumen	350% 100% 1500% 233%	2 1 2 3	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen	7 1 30 7	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen	140% 50% 120% 58,33%	

1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi														
1.02.12.01.01.16.024	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	- Terlaksananya Rapat Dewan Kawasan KEK di Aceh	12	Kali		6	Kali	6	Kali	100%			6	Kali	50%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat													
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Perizinan, Nonperizinan, Fasilitas dan Kemudahan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	24	Bulan							12	Bulan			
		- Fasilitas Layanan Perizinan dan Fasilitas Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	9	Dokumen	15	10	Dokumen	28	Dokumen	280%	30	Dokumen	43	Dokumen	478%
1.02.12.01.02.19	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat													
1.02.12.01.02.19.03	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Terlaksananya Penanganan kasus di kab/kota	29	Kasus		4	Kasus	4	Kasus	100%			4	Kasus	14%
		- Tersedianya Bimtek Tatacara Penanganan Kasus Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	150	Orang		50	Orang	50	Orang	100%			50	Orrang	33%
1.02.12.01.02.19.07	Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Tersusunnya Pergub Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	2	Pergub		1	Pergub	1	Pergub	100%			1	Pergub	50%
1.02.12.01.02.19.10	Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Pelayanan Perizinan ke Kab/Kota jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penanaman modal	23	Kab/Kota		45	Izin/Non izin	55	Izin/non izin	122%			55	Izin/Non Izin	239%
1.02.12.01.02.19.21	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya buku laporan survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	10	Buku		1	Buku	1	Buku	100%			1	Buku	10%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat													
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- Terlaksananya Penanganan kasus di kab/kota	29	Kasus	14	7	Kasus	7	Kasus	100%			21	Kasus	72%
		- Tersedianya Bimtek Tatacara Penanganan Kasus Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan/Bimtek E-Perizinan/Bimtek Bidang Penyelenggaraan A.B.C	150	Orang	40		Orang						40	Orang	27%
		- Tersedianya SOP dan SP	2	Buku		2	Buku	2	Buku	100%			2	Buku	100%
		- Tersoliasinya SOP dan SP	104	Orang							1	Kegiatan			
		- Tersusunnya Pergub Pendelegasian Wewenang dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah	2	Pergub	0	1	Pergub	1	Pergub	100%	1	Pergub	1	Pergub	50%
		- Terlaksananya Monitoring Pelayanan Perizinan ke Kab/Kota jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penanaman modal	23	Kab/Kota		18	Kab/Kota	7	Kab/Kota	39%	18	Kab/Kota	7	Kab/Kota	30%
		- Tersusunnya buku laporan survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	10	Buku	5	1	Buku	2	Buku	200%	2	Buku	7	Buku	70%
1.02.12.01.02.19	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat													
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang A	2.525	Izin dan Non Izin		450	Izin dan Non	718	Izin/non izin	160%			718	Izin/non izin	28%
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di bidang B	1.800	Izin dan Non Izin		650	Izin dan Non	446	Izin/non izin	69%			650	Izin/non izin	36%
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang C	17.435	Izin dan Non Izin		450	Izin dan Non	2500	Izin/non izin	556%			450	Izin/non izin	3%

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat														
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin Bidang A	260	Orang		30	Orang	30	Orang	100%	30	Orang	30	Orang	12%	
		- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin Bidang B	260	Orang		30	Orang	14	Orang	47%	30	Orang	14	Orang	5%	
		- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin Bidang C	260	Orang		72	Orang	40	Orang	56%	72	Orang	40	Orang	15%	
		- Terlaksananya Peninjauan dan Penelitian Lapangan Perizinan dan Nonperizinan Bidang A	2.525	Izin dan Non	718	550	Izin dan Non	735	Izin dan Non	134%	700	Izin dan Non	1453	Izin dan Non	58%	
		- Terlaksananya Peninjauan dan Penelitian Lapangan Perizinan dan Nonperizinan Bidang B	1.800	Izin dan Non	577	570	Izin dan Non	446	Izin dan Non	78%	500	Izin dan Non	1023	Izin dan Non	57%	
		- Terlaksananya Peninjauan dan Penelitian Lapangan Perizinan dan Nonperizinan Bidang C	17.435	Izin dan Non	2500	3.000	Izin dan Non	1.325	Izin dan Non	44%	2.435	Izin dan Non	3.825	Izin dan Non	22%	
		- Terlaksananya Rapat, Bimtek, Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang A	150	Orang							6	Orang				
		- Terlaksananya Rapat, Bimtek, Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang B	150	Orang							4	Orang				
		- Terlaksananya Rapat, Bimtek, Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang C	150	Orang							4	Orang				
1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
1.02.12.01.01.16.020	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	- Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Investasi di	421	Perusahaan		50	Perusahaan	51	Perusahaan	102%			51	Perusahaan	12%	
		- Workshop LKPM	120	OT		40	OT	0		0			0	OT	0%	
		- Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Perusahaan (Taskforce)	38	Kali		8	Kali	0		0			0	Kali	0%	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)														
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi															
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Terlaksananya Koordinasi dan Rapat-Rapat di Luar Daerah	15	Kali	0	4	Kali	3	Kali	75%	2	Kali			0%	
		- Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal	150	Perusahaan	51	20	Perusahaan	27	Perusahaan	135%	38	Perusahaan	78	Perusahaan	52%	
		- Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penanaman Modal Triwulanan	20	Laporan	0	10	Laporan	3	Laporan	30%	4	Laporan			0%	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Bimtek/Sosialisasi LKPM Online/OSS (DAK Non Fisik)	300	Peserta	0	315	Peserta(9 kali)	191	Perusahaan / Peserta	61%	140	Perusahaan / Peserta	191	Perusahaan / Peserta	64%	
		- Publikasi Media Cetak/Surat Kabar	24	Kali	0	4	Kali	3	Kali	75%	4	Kali	3	Kali	13%	
		- Rapat-rapat Koordinasi	42	Kali	0	4	Kali	3	Kali	75%	7	Kali	3	Kali	7%	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Pengelolaan kegiatan dan keuangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	20	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	5%	
		- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	120	Perusahaan	0	26	Perusahaan	40	Perusahaan	154%	79	Perusahaan	40	Perusahaan	33%	

1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)																
1 02 12 01 16 00 4	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengolahan Data Pertzinan dan Non Pertzinan, Sistem Informasi Penanaman Modal	14	Kegiatan		2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%			2	Kegiatan				14%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha																
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi																	
2 18 06 1 01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Terlaksananya Inhouse Training Analisa Data PM - Terlaksananya Inhouse Training Jurnalistik - Tersedianya Pengelolaan Data Base PM - Tersedianya Peta Spasial Perizinan dan Non Perizinan	15	Orang								20	Orang					
			15	Orang								25	Orang					
				Orang								15	Orang					
			5	Judul								2	Judul/Peta					
		- Terlaksananya pengolahan data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	117	Dokumen	3	1	Laporan	12	Laporan	1200%		1	Laporan	15	Laporan			
		-Terlaksananya penyajian data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	400	buku	3	1	Laporan	12	Laporan	1200%		1	Laporan	15	Laporan			
		-Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal	14	kegiatan	3	1	Laporan	12	Laporan	1200%		1	Laporan	15	Laporan			
		-Telaksananya administrasi rutin pada bidang pengolahan data dan informasi PM	25	kegiatan	3	1	Laporan	1	Laporan	100%		1	Laporan	4	Laporan			

Banda Aceh Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh


Marulius ST DEA
NIP. 197708052003121005

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analitis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah nilai realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi Investasi	5.500.000.000.000 rupiah	6.050.000.000.000 rupiah	6.650.000.000.000 rupiah	7.300.000.000.000 rupiah	9.111.000.000 rupiah	8.459.100.000 rupiah	7.300.000.000 rupiah	8.000.000.000 rupiah	
3	Jumlah penanaman modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM	Jumlah penanaman modal asing / dalam negeri	670 perusahaan	805 perusahaan	965 perusahaan	1.159 perusahaan	446 perusahaan	808 perusahaan	965 perusahaan	1.159 perusahaan	
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	1:65	1:70	1:75	1:80	1:29	0	1:75	1:80	
	Tingkat Kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,5	89,5	89,5	86,0	87,0	89,5	90	

Banda Aceh, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh


Heryanti S.T. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770305 200312 1 005

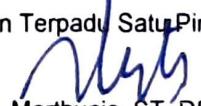
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Aceh

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pidie Jaya	Tersedianya aplikasi perizinan online dan prasarana pelayanan perizinan online untuk masyarakat	1 Paket	

Banda Aceh, Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh


 Marthunis, ST, DEA

Pembina Tk. I

NIP. 19770805 200312 1 005

TABEL T.C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPSTP ACEH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
							Tolok Ukur			Target							
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp	29.874.198.580			Rp	32.758.549.927					
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp	29.874.198.580			Rp	32.758.549.927					
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Serta kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp	24.969.174.338			Rp	27.476.038.089				
2	18	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp	197.098.246			Rp	226.710.389				
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	97.555.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	1	Dokumen	Rp	107.311.600
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPSTP tahun 2022	Banda Aceh	6	Dokumen	Rp	90.020.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPSTP tahun 2022	6	Dokumen	Rp	108.924.538
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TersusunnyaDokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	Banda Aceh	5	Dokumen	Rp	9.522.046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TersusunnyaDokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	5	Dokumen	Rp	10.474.251
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp	21.155.766.971					Rp	23.271.343.668	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Banda Aceh	14	Bulan	Rp	18.837.354.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14	Bulan	Rp	20.721.090.303
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Terpenuhinya pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	62 12	orang bulan	Rp	2.077.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Terpenuhinya pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 12	orang bulan	Rp	2.285.662.500
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	Banda Aceh	1	Dokumen	Rp	216.635.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	1	Dokumen	Rp	238.298.775
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Buku Besar; Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	Banda Aceh	24 24 3	buku buku buah	Rp	23.901.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Buku Besar; Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	24 24 3	buku buku Buah	Rp	26.292.090
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp	445.906.754					Rp	490.541.429
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersertifikasinya Aparatur DPMPSTP Standar ISO	Banda Aceh	1	Sertifikat	Rp	166.062.754	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Sertifikat	1	Sertifikat	Rp	182.669.029
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan kursus-kursus	Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta	18	orang	Rp	279.844.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan kursus-kursus	18	orang	Rp	307.872.400

2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.500.984.656							1.651.083.121	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	Banda Aceh	12	Bulan	Rp	32.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	12	Bulan		35.436.500
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Gudang , LED Videotron di Spg. Surabaya	Banda Aceh	12	Bulan Unit	Rp	801.318.590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sewa Gudang , LED Videotron di Spg. Surabaya	12	Bulan Unit	1	881.450.449
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	Banda Aceh	12	Bulan	Rp	250.479.286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12	Bulan		275.527.214
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	12	Bulan	Rp	189.953.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan		208.949.158
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	12	Bulan	Rp	37.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12	Bulan		41.712.000
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	12	Bulan	Rp	189.098.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan		208.007.800
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	795.908.600						Rp	875.499.460
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya; Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	4000 1200	lembar kg	Rp	51.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya; Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	4000 1200	Lembar Kg	Rp	56.584.000
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja Telepon, air, listrik dan kawat faximili/internet	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	12	Bulan	Rp	582.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Belanja Telepon, air, listrik dan kawat faximili/internet	12	Bulan	Rp	640.200.000
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107); Sarung Tangan Plastik; Sarung Tangan Fortune; Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah;	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	250; 87; 22;	botol; kotak pack;	Rp	162.468.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107); Sarung Tangan Plastik; Sarung Tangan Fortune; Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah;	250; 87; 22;	botol; Kotak Pack	Rp	178.715.460
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	873.509.111						Rp	960.860.022
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpelihara dan terbayarnya pajak mobil dinas; Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan roda 2:	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	23; 11:	unit; unit	Rp	672.199.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpelihara dan terbayarnya pajak mobil dinas; Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan roda 2:	23; 11:	unit;unit	Rp	739.418.900
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	12	Bulan	Rp	201.310.111	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	Rp	221.441.122
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi				Rp	572.497.988						Rp	629.747.786
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi, Rencana Pengembangan Penanaman Modal				Rp	422.132.218						Rp	464.345.439
2	18	01	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terlaksananya Investment Planning Forum Aceh	Banda Aceh	150	peserta	Rp	95.640.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Investment Planning Forum Aceh	150	peserta	Rp	105.204.385
						Tersusunnya Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan Wilayah		1	dokumen					tersedianya dokumen RP2M tahun 2024	1	dokumen		

						Tersusunnya Rencana Strategis Investasi Berkelanjutan/Investasi Hijau		1	dokumen				tersedianya dokumen rencana strategis investasi berkelanjutan	1	dokumen				
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersusunnya Prospektus Investasi	Banda Aceh	2	prospektus	Rp	326.491.868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terpetakan potensi dan profil ekonomi 23 kab/kota	2	prospektus	Rp	359141054		
						Tersusunnya Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal		23	Kab/Kota				tersedianya kajian Investasi	23	Kab/Kota				
						- Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor Pitching)		50	org				- Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor Pitching)	50	org				
						- Tersedianya Prospektus UMKM (UMKM Naik Kelas)		8	UMKM				Tersedianya Prospektus UMKM (UMKM Naik Kelas)	8	UMKM				
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Rp	150.365.770						Rp	165.402.347	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Produk Hukum	Rp	80.732.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal	1	Produk Hukum	Rp	88.805.200		
						Terlaksananya sosialisasi peraturan deregulasi penanaman modal		40	Orang				Terlaksananya sosialisasi peraturan deregulasi penanaman modal	40	Orang				
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Rekomendasi perubahan kebijakan penanaman modal Aceh Tahun 2023	Banda Aceh	1	Laporan	Rp	69.633.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekomendasi perubahan kebijakan penanaman modal Aceh Tahun 2023	1	Laporan	Rp	76.597.147		
						Terpetakannya indeks daya saing Tahun 2023 di Provinsi dan di 23 kab/kota di Aceh		1	Dokumen				Terpetakannya indeks daya saing Tahun 2023 di Provinsi dan di 23 kab/kota di Aceh	1	Dokumen				
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi				Rp	1.518.199.312						Rp	1.683.606.793	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Rp	1.518.199.312						Rp	1.670.019.242	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1) Tersedianya Kajian Analisis Investment Intelligence; 2) Terselenggaranya Koordinasi dan Promosi Investasi	Banda Aceh, Aceh Tengah, Sabang, Pulau Banyak-Singkil	2 2	Dokumen Kegiatan	Rp	346.257.483	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) Tersedianya Kajian Analisis Investment Intelligence; 2) Terselenggaranya Koordinasi dan Promosi Investasi	2 2	Dokumen Kegiatan	Rp	380.883.231		
2	18	3	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1. Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Sosial; 2. Tersedianya Materi/Bahan Promosi Investasi Aceh; 3. Terlaksananya Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue	Banda Aceh, Jakarta, India, UEA, China	2 3 1	Keg Dok Keg	Rp	1.171.941.829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Sosial; 2. Tersedianya Materi/Bahan Promosi Investasi Aceh; 3. Terlaksananya Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue	2 3 1	Keg Dok Keg	Rp	1.289.136.011		

2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				Rp	1.547.727.826					Rp	1.702.500.608
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Rp	1.547.727.826					Rp	1.702.500.608
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sosialisasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK; Rapat-Rapat Koordinasi; Sosialisasi KEK	Lhokseumawe	70 orang 150 orang orang 200		Rp	549.614.095	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Sosialisasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK; Rapat-Rapat Koordinasi; Sosialisasi KEK	70 orang 150 orang orang 200	Rp	604.575.504
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin dan non izin A, Jumlah izin dan non izin B Jumlah izin dan non izin C, Rakor Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin A, B dan C	Banda Aceh	555 Izin dan non izin 396 Izin dan non izin 3.835 Izin dan non izin 132 Peserta		Rp	630.683.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah izin dan non izin A, Jumlah izin dan non izin B Jumlah izin dan non izin C, Rakor Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin A, B dan C	555 Izin dan non izin 396 Izin dan non izin 3.835 Izin dan non izin 132 Izin dan non izin Peserta	Rp	693.751.300
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1) Tertanganinya Kasus Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan 2) Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 3) Terlaksananya Bimtek Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4) Sosialisasi SOP dan SP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; 5) Sosialisasi dan Pembinaan PTSP Kab/Kota, 6) Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Pendampingan e-perizinan pada klinik perizinan, 7)Terlaksananya Monev Perizinan dan Non Perizinan, 8)Rapat Kerja PTSP, 9) Tersusunnya Buku IKM, 10) Penyusunan Pergub Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah. 11) Qanun Aceh tentang Asimetri	kab/kota, langsa	1) 9 kasus 2) 90 orang 3) 40 Orang 4) 40 Orang 5) 8 Kab/Kota 6) 350 orang 7) 30 Izin/Non Izin 8) 30 Orang 9) 2 Buku 10) 1 Pergub		Rp	367.430.731	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1) Tertanganinya Kasus Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan 2) Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 3) Terlaksananya Bimtek Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4) Sosialisasi SOP dan SP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; 5) Sosialisasi dan Pembinaan PTSP Kab/Kota, 6) Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Pendampingan e-perizinan pada klinik perizinan, 7)Terlaksananya Monev Perizinan dan Non Perizinan, 8)Rapat Kerja PTSP, 9) Tersusunnya Buku IKM,	1) 9 kasus 2) 90 orang 3) 40 Orang 4) 40 Orang 5) 8 Kab/Kota 6) 350 orang 7) 30 Izin/Non Izin 8) 30 Orang 9) 2 Buku 10) 1 Pergub	Rp	404.173.804

2	18	05		PROGRAM PENGENALAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDI)				Rp	835.526.916					Rp	792.477.231	
2	18	05	1.01	Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Provinsi					Rp	835.526.916					Rp	919.079.607	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penanaman Modal	Banda Aceh	4	laporan	Rp	182.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penanaman Modal	4	laporan	Rp	201.190.000
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimtek/Sosialisasi IKPM Online/DSS (DAK Non Fisik), Publikasi Media Cetak/Surat Kabar Rapat rapat koordinasi	Banda Aceh dan Kab/kota	9 4 9	kali	Rp	518.957.186	PAD & DNFSIK	Bimtek/Sosialisasi IKPM Online/DSS (DAK Non Fisik), Publikasi Media Cetak/Surat Kabar Rapat rapat koordinasi	9 4 9	kali	Rp	570.847.404
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan Penanaman Modal	Banda Aceh dan Kab/kota	14	perusahaan	Rp	131.674.730	PAD & DNFSIK	Terlaksananya pengawasan Penanaman Modal	14	perusahaan	Rp	147.942.203
2	18	06		PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha					431.072.200						474.179.420	
2	18	06	1.01	Urutan Pengelolan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						Rp	431.072.200					Rp	474.179.420
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Terlaksananya pengolahan data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi 2. Terlaksananya penyajian data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi 3. Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal 4. Terlaksananya administrasi rutin pada bidang pengolahan data dan informasi PM	Banda Aceh	1 1 1 1	laporan laporan laporan laporan	Rp Rp Rp Rp	431.072.200	PAD	1. Terlaksananya pengolahan data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi 2. Terlaksananya penyajian data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi 3. Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal 4. Terlaksananya administrasi rutin pada bidang pengolahan data dan informasi PM	1 1 1 1	laporan laporan laporan laporan	Rp Rp Rp Rp	474.179.420

Banda Aceh, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh


Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I
NIP. 19770805 200312 1 005